

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASAS TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH BIDANG KESEHATAN PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI KOTA JAYAPURA**

Chintya Qhomariah

Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Jayapura”. Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan APBD di bidang kesehatan di kota jayapura pada masa pandemi *Covid-19* dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan transparansi pengelolaan APBD di bidang kesehatan di kota jayapura pada masa pandemi *Covid-19*.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : jenis penelitian empiris, sifat penelitian deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data primer, sumber data adalah sumber data sekunder yang masih relevan dengan permasalahan yaitu bahan hukum primer (Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021), bahan hukum sekunder (Literatur, buku-buku, makalah, majalah tulisan lepas, artikel, dan lain- lain), dan bahan hukum tersier (kamus dan internet), teknik pengumpulan data berupa analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pelaksanaan transparansi pengelolaan dana APBD bidang kesehatan pada masa pandemi *Covid-19* masih belum sepenuhnya terkhusus pada keterbukaan informasi pengelolaan dananya. Untuk hambatan dan kendalanya dalam pelaksanaan transparansi pengelolaan dana tidak ditemukan, hanya saja alasan mengapa masih minim keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana karena takut akan menggiring opini publik sehingga timbul berita *hoax*.

Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan, APBD, Keterbukaan Informasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamirul dan Alamsyahril, 2020, *Good Governance Dalam Perpektif Kualitas Pelayanan Publik*, cet I, CV. Pustaka Learning Center, Malang.
- Kasiram, M., 2010. *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, UIN Maliki Press, Malang.
- Karianga, Hendra, 2013. *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta.
- Khusaini, M., 2018. *Keuangan Daerah*, UB Press, Malang.
- Khusaini, Moh. dan Nurkholis, 2019. *Penganggaran Sektor Publik*, UB Press, Malang.
- Moenir, 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, L. J., 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mustanir, A. dkk, 2020. *Pelayanan Publik Implementasi dan Aktualisasi*, CV Penerbit Qiara Media, Pasuruan.
- Nasution, S., 2006. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Purnomo, F., 2020. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Qamar, Nurul. Dkk., 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, CV. Social Politic Genius, Makassar.
- Sedarmayanti, 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Setiawan, I. 2018. *Handbook Pemerintahan Daerah*, Wahana Resolusi, Yogyakarta.
- Waluyo, B. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukan Informasi

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Partisipasi Masyarakat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 perubahan kedua atas Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Skripsi

Dwipratama, C. 2011. *Pelaksanaan Informasi Keuangan Daerah Kepada Masyarakat dalam Pengelolaan APBD Kota Padang, Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang.

Rahmania, A. 2015. *Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bidang Kelautan dan Perikanan di Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2013*. Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Reza, E. M. 2018. *Tranparansi Penggunaan Dana Desa di Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Yulianti, W. 2019. *Analisis Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Jurnal

- Ansar, 2017. Problematika Alokasi dan Distribusi Anggaran Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Preventif*, Volume 8 Nomor 1.
- Rahmania, Aini dan Basuki, 2014. Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Transparansi dalam Pengelolaan. *SUPREMASI HUKUM*, Vol. 3, No. 2,.
- Maani, K. D., 2009. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Jurnal DEMOKRASI*, Vol. VIII No. 1, 47.
- Pradana, I. P., 2014. Transparansi Birokrasi dalam Pengelolaan APBD di Kota Kupang. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP Universitas Nusa Cendana*, Vol 18 No 2.
- Salle, A. (n.d.), Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*.

Lain-Lain

- Dewi Wulandari (Eds), 2021, Dinkes Kota Jayapura anggarkan Rp5 miliar untuk operasional vaksinasi (<https://jubi.co.id/papua-dinkes-kota-jayapura-anggarkan-rp5-miliar/>) Diakses 1 April 2021.